

Website Development Training and Mentoring for Subdistrict Administrative Services

Bimbingan Dan Pelatihan Pembuatan Website Untuk Kebutuhan Administrasi Kecamatan

Arthur M. Rumagit, Hendra Riogilang, Benefit S. Narasiang, Giofany R. B Gosal
Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado; Jl. Kampus Unsrat Bahu, Kec.
Malalayang, Kelurahan Malalayang
arthur_rumagit@unsrat.ac.id, hendra.riogilang@unsrat.ac.id, benefitsemuel@unsrat.ac.id,

Article History:

Received: 30 Nov. 2025

Revised: 24 Feb. 2026

Accepted: 24 April 2026

Keywords: *Digital Government; ICT Training; Public Administration; Transparency; Website Development.*

Abstract

The development of e-government has encouraged local governments to improve public services through digital platforms. However, Bunaken District, Manado City, faced challenges in delivering public information and administrative services due to the lack of a dedicated website and limited digital competencies among its staff. This community service program aimed to enhance the capacity of district personnel in developing and managing a website to support administrative functions, transparency, and public service delivery. The program was implemented through four stages: needs assessment and planning, website development training workshops, continuous mentoring, and post-training evaluation. The training focused on website design, content management systems (CMS), digital content management, and website maintenance. The results indicated a significant improvement in participants' information and communication technology (ICT) skills, particularly in website management and content updating. Furthermore, an operational district website was successfully developed and utilized as a medium for disseminating public information and supporting administrative services. The implementation of the website contributed to improved transparency, accessibility of information, and digital public services. In conclusion, website development training and mentoring effectively strengthened the digital administrative capacity of Bunaken District and supported the implementation of e-government at the local government level. Continuous technical assistance and periodic capacity-building programs are recommended to ensure the sustainability of website management and development.

PENDAHULUAN

Konsep pemerintahan digital (e-government) telah berkembang sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik berkat kemajuan teknologi informasi. Salah satu komponen penting e-government adalah situs web instansi pemerintahan, yang memiliki kemampuan untuk mendukung administrasi internal dan menyampaikan informasi publik secara

real time. Namun, banyak pemerintah lokal, terutama di tingkat kecamatan atau desa, memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur web yang terbatas. Akibatnya, pengelolaan website tidak selalu optimal.

Layanan publik digital yang lebih baik diperlukan di Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Pada saat ini, kecamatan belum memiliki situs web resmi yang dikelola secara mandiri, sehingga informasi tentang administrasi dan layanan publik masih tersebar melalui media konvensional atau portal kota secara umum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan dan bimbingan untuk aparat kecamatan dalam membangun situs web mereka sendiri, sehingga mereka dapat mandiri dalam mengelola konten web mereka, mempublikasikan informasi, dan memberikan layanan yang lebih transparan kepada masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan website dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola layanan publik berbasis digital dan mendukung implementasi e-government di tingkat lokal (Kuswandi et al., 2018; Handayani et al., 2022). Salah satu contohnya adalah pelatihan e-government yang diberikan kepada perangkat desa di Kabupaten Karawang. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar staf mampu membuat dan mengelola situs web sederhana untuk desa mereka secara mandiri setelah mengikuti pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi digital aparatur berkontribusi terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan informasi dan layanan publik secara daring melalui website resmi pemerintah (Kuswandi et al., 2018). Selain itu, penelitian di Desa Air Dingin menunjukkan bahwa pelatihan dalam pembuatan website bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis aparatur desa, tetapi juga mendorong ide tentang "desa digital". Desa digital dapat memiliki situs web yang lebih terbuka dengan informasi publik, layanan administrasi, laporan keuangan, dan dokumentasi kegiatan pemerintahan. Pengembangan website pemerintah juga mendukung penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memperkuat transformasi menuju desa digital (Handayani et al., 2022).

Pada konteks yang lebih luas, kualitas website pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi e-government. Warjiyono dan Hellyana (2018) menjelaskan bahwa kualitas informasi, kemudahan penggunaan, dan kualitas interaksi layanan merupakan faktor utama yang memengaruhi efektivitas website pemerintah. Selain itu, Rahmadianie (2023) menyatakan bahwa website pemerintah yang dikelola secara baik mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penelitian Renmaur et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kualitas website pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik digital.

Secara global, transformasi digital pemerintahan telah menjadi agenda strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sektor publik. United Nations (2024) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperluas akses informasi bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, OECD (2023) dan World Bank (2023) menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur digital, dan penerapan tata kelola digital yang berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan transformasi pemerintahan berbasis elektronik.

Temuan-temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa pelatihan dan pembangunan website bukan sekadar kegiatan teknis, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan lokal. Dengan adanya landasan empiris dari berbagai penelitian tersebut, kegiatan bimbingan dan pelatihan pembuatan website bagi Kecamatan Bunaken menjadi sangat relevan untuk mendukung modernisasi administrasi serta memperkuat implementasi e-government di tingkat kecamatan.

Transformasi digital pemerintahan di Indonesia juga didukung oleh kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. Implementasi SPBE menekankan integrasi layanan digital pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan

berbasis teknologi informasi (Presiden Republik Indonesia, 2018). Selain itu, Kementerian PANRB (2024), Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (2024), serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2023) menegaskan pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital dalam mendukung transformasi layanan publik di tingkat daerah.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pengabdian masyarakat berbasis e-government, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tahapan kegiatan meliputi:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, tim pelaksana menentukan kebutuhan Kecamatan Bunaken untuk penggunaan situs web untuk administrasi dan layanan publik. Pemetaan kemampuan awal aparatur dalam mengelola teknologi informasi, peninjauan infrastruktur dan perangkat digital yang tersedia, dan analisis jenis data yang dibutuhkan masyarakat adalah semua bagian dari proses ini. Hasil identifikasi digunakan untuk membuat materi pelatihan yang mencakup pengenalan konsep website, struktur konten, penggunaan CMS, dan elemen keamanan data. Untuk memastikan bahwa proses pelatihan berjalan dengan terarah dan efektif, tahap perencanaan ini juga mencakup pembagian tugas instruktur dan penyusunan jadwal kegiatan.

2. Pelatihan / workshop

Kegiatan workshop yang berfokus pada teknik pembuatan dan pengelolaan website melaksanakan tahap pelatihan secara langsung. Struktur dasar website, fitur utama CMS seperti WordPress, dan prosedur pembuatan halaman penting untuk kecamatan, seperti profil wilayah, layanan administrasi, struktur organisasi, dan pengumuman, diperkenalkan kepada peserta. Selama pelatihan, peserta didampingi secara langsung oleh instruktur untuk memastikan pemahaman mereka tentang setiap tahap, mulai dari instalasi CMS hingga publikasi konten. Untuk meningkatkan keterampilan praktis peserta, workshop ini memberikan mereka kesempatan untuk menerapkan teori ke dalam kehidupan nyata.

3. Bimbingan Berkelanjutan (Monitoring)

Setelah pelatihan, peserta menerima bimbingan tambahan untuk memastikan bahwa website kecamatan terus dikelola. Pada tahap ini, instruktur memberikan pendampingan secara teratur untuk membantu siswa menyelesaikan masalah teknis, memastikan pembaruan konten berjalan dengan konsisten, dan meningkatkan kemandirian aparat dalam mengelola website. Monitoring ini melacak kualitas konten yang dipublikasikan, keamanan website, dan kesesuaian data dengan kebutuhan masyarakat. Dengan bantuan ini, peserta mendapatkan dukungan penuh untuk mengurangi kesalahan teknis dan memastikan bahwa website digunakan secara optimal.

4. Evaluasi

Proses evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif pelatihan dan seberapa baik peserta menggunakan keterampilan mereka. Analisis penggunaan website yang telah dibuat, perbandingan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan, dan tanggapan dari aparat kecamatan mengenai manfaat pelatihan terhadap tugas administrasi mereka adalah semua komponen teknis yang dievaluasi. Selain itu, evaluasi juga mencakup aspek teknis seperti kecepatan akses, kelengkapan konten, konsistensi pembaruan, dan tingkat pemahaman aparat tentang proses pengelolaan website. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk membuat saran yang mencakup peningkatan kapasitas aparat dan kebutuhan akan pendampingan jangka panjang.



Gambar 1. Memaparkan singkat mengenai aplikasi dan animasi dalam pengenalan institusi Jurusan Teknik Elektro Unsrat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Kecamatan Bunaken, kemampuan ICT aparturnya meningkat secara signifikan sebagai hasil dari pelaksanaan program bimbingan dan pelatihan pembuatan website. Hasil observasi yang dilakukan selama pelatihan menunjukkan bahwa peserta memperoleh kemampuan dengan cepat. Ini terutama terlihat pada pemahaman mereka tentang struktur dasar website, penggunaan Content Management System (CMS), dan kemampuan untuk mengunggah dan memperbarui konten secara mandiri. Perubahan ini dapat dilihat dari perbandingan hasil pre-test dan post-test. Meskipun sebagian besar peserta sebelumnya tidak tahu cara membuat halaman web, mereka akan dapat membuat halaman penting seperti beranda, profil kecamatan, struktur organisasi, layanan publik, dan halaman berita dan pengumuman setelah mengikuti pelatihan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kuswandi et al. (2018) dan Handayani et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pelatihan website mampu meningkatkan kompetensi digital aparatur pemerintah dalam mengelola informasi dan layanan publik berbasis teknologi informasi. Peningkatan kemampuan peserta menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan dan pendampingan yang diterapkan dalam kegiatan ini efektif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada tingkat pemerintahan lokal.

Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga menghasilkan pembuatan situs web kecamatan yang dapat digunakan untuk administrasi dan informasi publik. Website yang dibangun menyediakan berbagai informasi strategis, termasuk gambaran umum Kecamatan Bunaken, visi dan misi, serta struktur organisasi dan layanan publik yang penting. Website ini terus diperbarui dan mudah diakses, sehingga staf kecamatan dapat menambahkan informasi baru kapan saja tanpa bergantung pada orang lain. Temuan ini juga sejalan dengan Bustomi et al. (2024) yang menyatakan bahwa website pemerintah dapat berfungsi sebagai media informasi, publikasi, dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan website memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Pembuatan situs web ini merupakan langkah awal penting bagi Kecamatan Bunaken dalam membangun layanan publik berbasis internet.

Dari perspektif transparansi, situs web kecamatan membantu menyebarkan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Melalui kanal digital yang resmi dan mudah diakses, masyarakat sekarang dapat mengetahui informasi yang sebelumnya sulit diakses. Pengumuman, agenda kegiatan, alur layanan, dan informasi administratif dapat didistribusikan dengan lebih cepat dan akurat oleh pemerintah kecamatan. Ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, yang berarti bahwa orang-orang berhak untuk mengetahui apa yang terjadi dengan pelayanan publik dan kegiatan pemerintah di daerah mereka. Oleh karena itu, situs web ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan catatan tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kecamatan. Hasil ini sejalan dengan temuan Mahayoni dan Wirantari (2021) yang menyatakan bahwa website pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan informasi yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan pelatihan dan pengelolaan website kecamatan, ditemukan beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitas penerapan website sebagai media administrasi digital:

1. **Sumber Daya Manusia**
Setelah melakukan pelatihan sebagian besar pegawai bisa mengelola website tersebut, namun terdapat resistensi awal karena adanya pegawai yang belum terbiasa dengan CMS.
2. **Keterbatasan Infrastruktur**
Akses internet di daerah tersebut belum memadai dan perangkat keras belum selalu memadai.
3. **Pemeliharaan Konten**
Para pegawai dalam kantor kecamatan butuh konsisten agar konten website terus di perbarui (informasi kegiatan yang di lakukan kantor kecamatan dan pengumuman) agar website tetap relevan dan berguna bagi Masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan dan bimbingan pembuatan website untuk kebutuhan administrasi Kecamatan Bunaken telah meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi. Peserta telah menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memahami konsep dasar

pengembangan website, mengelola konten digital, dan memanfaatkan website. Pelatihan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan workshop, pendampingan berkelanjutan, dan evaluasi. Hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa keberadaan website mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan publik, khususnya dalam menyediakan informasi administratif yang sebelumnya sulit diakses masyarakat secara cepat. Meskipun demikian, untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan website, masih ada masalah terkait keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan peningkatan kemampuan teknis aparatur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi atas dukungan dana dalam pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Bunaken beserta seluruh aparatur dan staf yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelatihan, pendampingan, hingga evaluasi program.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kuswandi, A., Kurniasih, D., & Karniawati, N. (2018). *Pelatihan e-government bagi aparat pemerintah desa di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang*. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 2(1).
2. Handayani, S., Hanila, S., Prawitasari, A., Fitriano, Y., & Wulandari, W. (2022). *Pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan website menuju desa digital Desa Air Dingin*. *Jurnal Dehasen Mengabdi*, 1(2), 179–182.
3. Bustomi, A., Mocodompis, C. T. K. R., Larasati, D. P., Sulistiawati, & Muhammad, P. (2024). *Pembuatan website untuk jendela informasi dan publikasi pemerintahan Desa Cijengkol-Serangpanjang*. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 3(1), 28–34.
4. Kurniawan, D., Wahyuningsih, T., & Aru, H. (2020). *Pembuatan web dalam layanan bimbingan dan konseling jenjang SMP/MTs*. *International Journal of Community Service Learning*, 4(1), 52–58.
5. Mahayoni, G. A. D. I., & Wirantari, I. D. A. P. (2021). *Pengembangan website desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Bona, Gianyar*. *Journal of Contemporary Public Administration*, 1(1), 13–19. <https://doi.org/10.22225/jcpa.1.1.2021.13-19>
6. Rahmadianie, F. N. (2023). *Efektivitas website desa sebagai media e-government dalam pelayanan publik di Desa Margahayu Tengah menggunakan pendekatan Rasch Model*. *Jurnal Inspirasi*, 14(1). <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v14i1.2334>
7. Warjiyono, W., & Hellyana, C. M. (2018). *Pengukuran kualitas website pemerintah desa Jagalempeni menggunakan metode WebQual 4.0*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 5(2). <https://doi.org/10.25126/jtiik.201852666>
8. Renmaur, H. R., Patangke, D., & Taebenu, M. M. (2025). *Analysis of the public satisfaction index toward the website of the Teluk Wondama Regency Government, West Papua, Indonesia*. *International Journal of Kybernology*, 6(2). <https://doi.org/10.33701/ijok.v6i2.5840>
11. United Nations. (2024). *United Nations e-government survey 2024*. United Nations.
12. OECD. (2023). *Digital government review and public sector transformation*. OECD Publishing.

13. World Bank. (2023). *GovTech maturity index 2023 update*. World Bank.
14. Kementerian PANRB. (2024). *Transformasi digital pemerintahan menuju SPBE terintegrasi*. Kementerian PANRB.
15. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2024). *Roadmap transformasi digital Indonesia 2024–2029*.
16. Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*.
17. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah berbasis digital*.